



# PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

# ZONA INTEGRITAS

- Predikat yang diberikan kepada **instansi pemerintah** yang pimpinan dan jajarannya mempunyai **komitmen** untuk mewujudkan **WBK/WBBM** melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam **hal pencegahan korupsi** dan **peningkatan kualitas pelayanan publik**

# ZONA INTEGRITAS



**Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)**

Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik

# DASAR HUKUM

## DASAR HUKUM PERMENPAN

1. UU 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU 30 / 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. UU 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
7. Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Perpres 55 / 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 / 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Permen PAN dan RB 14 / 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

## PERMENPAN tentang ZI

Permen PANRB 20 / 2012  
tentang Pedoman Umum  
Pembangunan ZI menuju Wilayah  
Bebas dari Korupsi

diubah

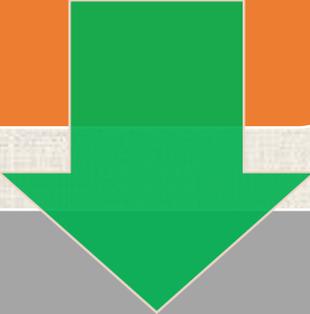
Permen PANRB 60 / 2012  
tentang Pedoman  
Pembangunan Zona Integritas  
menuju WBK dan WBBBM di  
Lingkungan K/L dan Pemda

diubah

Permen PANRB 52 / 2014  
tentang Pedoman  
Pembangunan ZI menuju WBK  
dan WBBM di Lingkungan  
Instansi Pemerintah

# HAKIKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan K/L/Pemda



Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun **percontohan-percontohan** pada tingkat unit kerja K/L dan Pemda sebagai ZI Menuju WBK-WBBM

# PROSES PEMBANGUNAN

## PENCANANGAN ZI

- Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai
- Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas

## PEMBANGUNAN ZI

- Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM
- Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM

## PENGUSULAN

- Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)
- TPI melaporkan kepada pimpinan instansi
- Pengusulan ke Kemen PAN RB

## Reviu TPN

- Reviu oleh Tim Penilai Nasional

## Penetapan WBK/WBBM

- MenPANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK
- MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM

# SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH	Opini BPK "WTP"	Opini BPK "WTP" selama minimal 2 tahun berturut-turut
	Nilai AKIP minimal "CC"	
TINGKAT UNIT KERJA	Setingkat Es. I s.d Es. III	
	Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis	
	Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
		Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

# SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal	75	85
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal	18 (90%)	18 (90%)
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	13,35 (80%)	13,35
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal	3,5 (70%)	3,5
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal	-	16 (80)

# KERANGKA LOGIS PENILAIAN



# 1. Manajemen Perubahan

Tim Kerja

Dokumen Rencana  
Pembangunan  
Zona Integritas

Pemantauan dan  
Evaluasi  
Pembangunan  
WBK/WBBM

Perubahan pola  
pikir dan budaya  
kerja

## 2. Penataan Tatalaksana

**Prosedur  
operasional tetap  
(SOP) kegiatan  
utama**

**E-Office**

**Keterbukaan  
Informasi Publik**

# 3. Penataan Manajemen SDM

Perencanaan  
kebutuhan pegawai  
sesuai dengan  
kebutuhan organisasi

Pola Mutasi Internal

Pengembangan  
pegawai berbasis  
kompetensi

Penetapan kinerja  
individu

Penegakan aturan  
disiplin/kode  
etik/kode perilaku  
pegawai

Sistem Informasi  
Kepegawaian

# 4. Akuntabilitas Kinerja

**Keterlibatan  
pimpinan**

**Pengelolaan  
Akuntabilitas  
Kinerja**

# 5. Penguatan Pengawasan

**Pengendalian  
Gratifikasi**

**Penerapan  
SPIP**

**Pengaduan  
Masyarakat**

**Whistle-  
Blowing  
System**

**Penanganan  
Benturan  
Kepentingan**

# 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

**Standar Pelayanan**

**Budaya Pelayanan  
Prima**

**Penilaian  
kepuasan  
terhadap  
pelayanan**

## PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

**Nilai persepsi korupsi  
(survei eksternal)**

**Presentase penyelesaian TLHP**

## PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

**Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)**



---

**TERIMA KASIH**